



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Adakan Sidang Pengucapan Putusan Uji Materi UU Pilkada

Jakarta, 22 Juli 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) pada Rabu (22/6), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 18/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Tiuridah Silitonga, S.T., M.M, Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H, Nurhidayat, S.Sos, I Mohammad Fadli, S.H yang keseluruhan berprofesi sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Norma yang diajukan untuk diuji adalah: Pasal 134 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 143 ayat (2).

Para Pemohon mendalilkan ketentuan UU *a quo* tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang apabila kata “hari” yang dimaksud dalam ketentuan pasal a quo merupakan “hari kalender” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 28 UU Pilkada.

Pemohon berpendapat baik Pemilu maupun Pilkada memiliki persamaan dalam jenis pelanggarannya yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu, dan bukan tindak pidana pemilu. Tetapi pada limitatif waktu penanganan pelanggaran pilkada yang ditentukan dalam UU Pilkada terlalu singkat apabila dibandingkan dengan limitatif waktu penanganan 9 pelanggaran yang ditentukan dalam UU Pemilu. Bagi para Pemohon, definisi kata “hari” dan perbedaan limitatif waktu tindak lanjut penanganan pelanggaran tersebut akan menimbulkan permasalahan terutama dalam upaya penanganan pelanggaran pemilihan. Bahwa penggunaan “hari kalender” tidak menghitung faktor geografis Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, khususnya kabupaten-kabupaten di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang mana letak antar kecamatan sebagian besar ditempuh dengan menggunakan jasa transportasi laut. Sehingga kata “hari” yang dimaksud dalam ketentuan pasal a quo adalah hari kalender dinilai terlalu singkat sehingga berpotensi daluarsa terhadap penyampaian laporan pelanggaran pemilihan dan/atau permohonan penyelesaian sengketa pemilihan.

Selain itu di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIII/2015 khususnya pengujian terhadap kata “hari” dalam Pasal 157 ayat (8) juncto Pasal 1 angka 28 UU Pilkada. Dalam amar putusan halaman 51, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan kata “hari” dalam pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “hari kerja”.

Menanggapi Permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyarankan kepada para Pemohon untuk membuat diagram terkait penjadwalan perbandingan hari kerja dan hari kalender terhadap kinerja Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pilkada. Sedangkan Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta kepada para Pemohon untuk menjelaskan argumentasi mengenai waktu yang diberikan undang-undang yang dimaksudkan oleh para Pemohon tersebut tidak cukup. “Belum ada bukti empirisnya bahwa sekian hari itu tidak cukup.” terang Saldi.

Dalam sidang dengan agenda Perbaikan Pemohonan (10/6), Pemohon memperbaiki batu uji di halaman 4 (empat) dan posita pada halaman 21 (dua puluh satu). “Juga ada perbaikan permohonan semua frasa hari diganti dengan kata hari,” jelas Tiuridah kepada Majelis Hakim (**ASF/SRI**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id